

## **Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara**

### *Evaluation of the Implementation of Government Accounting Standards Statement 05 Regarding Inventory Accounting at the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi Province*

Abdul Wahid Supriatna Mile<sup>1</sup>, I Gede Suwetja<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus  
Bahu, Manado, 95115, Indonesia

<sup>1</sup>E-mail : ryanmile.rm@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Persediaan merupakan bagian penting untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Persediaan adalah aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional, seperti barang habis pakai, barang tidak habis pakai, dan barang bekas. Tanpa adanya persediaan, instansi pemerintah akan kesulitan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang secara populasi memiliki jumlah yang besar dan dari segi wilayah yang begitu luas. Aktifitas di lingkungan instansi pemerintahan juga terganggu tanpa adanya persediaan, karena persediaan juga meliputi barang-barang yang mendukung kegiatan administrasi dan kantor di instansi pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah 05 tentang akuntansi persediaan pada kantor wilayah kementerian agama di provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pernyataan standar akuntansi 05 tentang akuntansi persediaan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan penerapannya dan aturan yang berlaku.

Kata kunci : Evaluasi, Akuntansi Persediaan, Kementerian Agama.

#### **ABSTRACT**

*Inventory is an important part to carry out operational activities in the context of service to the community. Inventories are current assets in the form of goods or equipment used to support operational activities, such as consumables, non-consumables, and used goods. Without supplies, government agencies will be difficult in performing services to communities that have a large number of people and large areas of territory. Activities in the environment of government agencies are also disrupted without supplies, because supplies also include goods that support administrative activities and offices in government agencies. The purpose of this study is to find out how to apply the statement of government accounting standards 05 regarding inventory accounting at the regional office of the ministry of religion in the province of North Sulawesi. The method used is descriptive analysis method. The results showed that the application of the statement of accounting standard 05 regarding inventory accounting at the regional office of the ministry of religion in the province of North Sulawesi was in accordance with its application and the applicable rules.*

*Keywords: Evaluation, Inventory Accounting, Ministry of Religion.*

Diterima: 06-01-2022; Disetujui untuk Publikasi: 18 -01-2022

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*

p-ISSN: 24072-361X

## 1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, penting untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik melalui sistem pemerintahan yang baik yaitu dengan menciptakan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan Negara. Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik, perlu adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintah, karena melalui proses akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan di bidang akuntansi harus didasari dengan dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu untuk memberikan pedoman dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Sejak 22 Oktober 2010, Pemerintah telah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2010 menggantikan PP 24 tahun 2005 tentang hal yang sama. Dalam PP 71 tahun 2010 terdapat dua SAP, yaitu SAP berbasis Akruwal yang terdapat dalam lampiran I, dan SAP berbasis kas Menuju Akruwal yang terdapat pada lampiran II (lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun).

ada instansi pemerintahan seperti pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara persediaan merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan kegiatan operasional dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Persediaan merupakan aset lancar berupa bentuk barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional misalnya barang habis pakai, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai. Tanpa adanya persediaan, instansi pemerintahan akan sulit dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang secara populasi memiliki jumlah yang besar dan segi wilayah yang begitu luas. Aktifitas di lingkungan instansi pemerintahan juga terganggu tanpa adanya persediaan, karena persediaan juga meliputi barang-barang yang mendukung kegiatan administrasi dan kantor di instansi pemerintahan.

Sistem pencatatan persediaan yang baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dapat meningkatkan kualitas kerja dalam pelayanan publik. Pekerjaan yang transparan dan akuntabel dalam menyusun laporan keuangan terutama pada bagian persediaan instansi pemerintahan membuat persediaan akan lebih terlihat manfaatnya bagi masyarakat. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu instansi pemerintahan memandang arti pentingnya berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Maka dari itu, dibutuhkan manajemen yang baik pada persediaan untuk mengaturnya agar tidak terjadi kesalahan sistem dalam aktifitas operasional di instansi pemerintahan.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAP 05 tentang akuntansi persediaan pada kantor kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Akuntansi.** Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan sebuah kejadian ekonomi dan melaporkannya kepada para pengambil keputusan (Kieso, Weygant, dan Kimmel 2015:4). Akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu (Sujarweni, 2016:1).

**Akuntansi Sektor Publik.** Organisasi Sektor Publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan bukan untuk mencari laba Sujarweni (2016:3-4). Tujuan didirikannya organisasi sektor publik untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak mencari keuntungan atau laba sebagai hasil akhirnya. Aktifitas utama yang dilakukan adalah pelayanan publik misalnya bantuan hukum, pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi publik, dan penyediaan pangan.

**Standar Akuntansi Pemerintahan.** Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 (5) SAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi

mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP.

**Akuntansi Pemerintahan.** Akuntansi pemerintah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya (Sujarweni, 2016 : 18).

**Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.** Pemerintah daerah sekarang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

**PSAP 05 Tentang Akuntansi Persediaan.** Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Penelitian Terdahulu.** Waworega, A. Angie (2018) tentang Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa mendapatkan hasil bahwa penerapan akuntansi untuk persediaan pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan PSAP No.05 tentang Akuntansi Persediaan. Rozak D.A (2015) tentang Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan Peranannya Dalam meningkatkan Internal Control Persediaan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis mendapatkan hasil bahwa standar akuntansi mengenai persediaan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis berperan dalam meningkatkan pengendalian intern persediaan karena penerapan standar akuntansi merupakan hal yang dapat mengurangi risiko dalam pengendalian intern persediaan. Mahmud, Rahmat (2016) tentang Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Dengan Menggunakan Uang Persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota Manado mendapatkan hasil bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota Manado sudah sesuai dengan SE.900/316/BAKD dalam sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota Manado telah didukung oleh dokumen-dokumen terkait seperti Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta dokumen transaksi untuk melengkapi prosedur pengeluaran kas.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Data kualitatif dalam penelitian ini yakni data yang menguraikan sejarah singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, struktur organisasi, keadaan dan penerapan akuntansi persediaan di Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer. Dalam hal ini, data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan Pejabat/Pegawai kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi. Dengan cara yaitu :

1. Memaparkan hasil penelitian dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang berhubungan dengan penerapan PSAP 05 tentang akuntansi persediaan
2. Mengevaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 tentang Akuntansi Persediaan pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.
3. Memberikan kesimpulan akhir dan saran terhadap pelaksanaan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 tentang akuntansi persediaan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

Data-data yang dianalisis berupa data laporan persediaan dan dokumen lain terkait dengan persediaan.

**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil Penelitian**

**Klasifikasi Persediaan.** Klasifikasi persediaan pada kantor wilayah kementerian agama provinsi sulawesi utara berdasarkan fungsinya sesuai dengan kodefikasi yaitu barang habis pakai seperti barang konsumsi (117111), alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya (101039999) dan barang persediaan (1010501008).

**Pengakuan persediaan.** Pengakuan persediaan yang ada pada kantor wilayah kementerian agama provinsi sulawesi utara yaitu ketika barang memiliki potensi atau manfaat ekonomi dan memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Untuk hak kepemilikan/kepenguasaan berpindah dibuktikan dengan berita acara serah terima barang. Untuk pencatatan barang persediaan yang diperoleh dengan pembelian, bukti dokumen menggunakan faktur, surat kontrak dan berita acara serah terima. Hal ini menjadi dasar untuk pencatatan dalam aplikasi persediaan.

**Pengukuran persediaan.** Pengukuran persediaan yang ada pada kantor wilayah kementerian agama provinsi sulawesi utara dicatat sebesar harga beli yang dimana harga beli merupakan bagian dari biaya perolehan. Untuk harga produksi tidak dimasukkan karena kantor wilayah kementerian agama provinsi sulawesi utara tidak memproduksi barang, dan tidak memperoleh barang dengan hasil donasi. Persediaan dinilai berdasarkan metode HPT (Harga Pembelian Terakhir).

**Beban Persediaan.** Beban Persediaan pada kantor wilayah kementerian agama Provinsi Sulawesi Utara dicatat sebesar pemakaian persediaan.

**Penyajian dan Pengungkapan persediaan.** Kantor wilayah kementerian agama provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam pengukuran persediaan bahwa pada saat membeli persediaan, persediaan tersebut dicatat sesuai harga beli. Dan pada proses penyajiannya, persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar berdasarkan biaya perolehan karena barang diperoleh dari pembelian, tidak dari hasil donasi atau rampasan. Untuk penyajiannya, persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca pemerintah berdasarkan biaya perolehan karena persediaan diperoleh dengan pembelian.

**4.2 Pembahasan**

**Tabel 1.1 Perbandingan Klasifikasi Persediaan**

PSAP 05	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara
Klasifikasi: persediaan merupakan aset yang berupa : a. Barang atau perlengkapan yang dipakai dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah. b. Barang atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.	Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional kantor wilayah kementerian agama provinsi sulawesi utara seperti barang konsumsi, dan barang yang diberikan/diserahkan kepada masyarakat.

Sumber : Data Olahan

**1.2 Tabel Perbandingan Pengakuan Persediaan**

PSAP 05	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara
Pengakuan Persediaan diakui :	a. memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal

a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.	b. saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah dibuktikan dengan berita acara serah terima. Kantor wilayah kementerian agama menggunakan dokumen terkait seperti Berita Acara Serah Terima.
b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau berpindah.	

Sumber : Data Olahan

**Tabel 1.3 Tabel Perbandingan Pengukuran Persediaan**

<b>PSAP 05</b>	<b>Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara</b>
Pengukuran Persediaan disajikan sebesar: <ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya perolehan jika diperoleh dengan pembelian.</li> <li>Harga pokok produksi jika memproduksi sendiri</li> <li>Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.</li> </ol>	Persediaan disajikan berdasarkan biaya perolehan karena diperoleh melalui pembelian. Dan dinilai menggunakan metode HPT (Harga Pembelian Terakhir)

Sumber : Data Olahan

**Tabel 1.4 Tabel Perbandingan Beban Persediaan**

<b>PSAP 05</b>	<b>Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara</b>
Beban persediaan Dicatat menggunakan metode : <ol style="list-style-type: none"> <li>Perpetual</li> <li>Periodik</li> </ol>	Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan, dicatat menggunakan metode perpetual. Disajikan dalam rangka penyajian beban operasional.

Sumber : Data Olahan

**Tabel 1.5 Tabel Perbandingan Penyajian dan Pengungkapan Persediaan**

<b>PSAP 05</b>	<b>Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara</b>
Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan mengungkapkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.</li> <li>Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.</li> <li>Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik.</li> <li>Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.</li> </ol>	Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir karena diperoleh dengan pembelian, kantor wilayah kementerian agama tidak memiliki biaya standar karena tidak memproduksi barang sendiri dan tidak memperoleh dengan cara donasi / rampasan. Kantor wilayah kementerian agama provinsi mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Dan untuk barang dalam kondisi rusak/usang tidak diungkapkan karena tidak ada transaksinya.

Sumber : Data Olahan

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dari hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Jenis-jenis barang persediaan pada kantor wilayah kementerian agama sudah sesuai dengan PSAP 05 dimana berdasarkan data yang diperoleh dalam laporan persediaan untuk tahun anggaran 2020 terdapat barang konsumsi, dan barang yang diberikan/diserahkan kepada masyarakat.
2. Pengakuan persediaan pada kantor wilayah kementerian agama provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 tentang Akuntansi Persediaan.
3. Pengukuran persediaan pada kantor wilayah kementerian agama provinsi Sulawesi utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 tentang Akuntansi Persediaan.
4. Beban Persediaan pada kantor kementerian agama provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 tentang Akuntansi Persediaan.
5. Penyajian dan pengungkapan persediaan pada kantor wilayah kementerian agama provinsi Sulawesi utara sudah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 tentang Akuntansi Persediaan.

### 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan kepada instansi kantor wilayah Kementerian Agama provinsi Sulawesi Utara yaitu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka selalu memperhatikan dan meningkatkan sumber daya dalam hal ini fungsional akuntansi untuk barang persediaan terkait, sehingga minimnya informasi dalam mengakses laporan keuangan yang berdampak pada informasi yang kurang relevan untuk pihak yang membutuhkan bisa diminimalisir. Hal ini juga seiring dengan tujuan yaitu terciptanya *good governance* dengan selalu mengedepankan prinsip akuntansi yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia. Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2019 Audited. Jakarta.
- Kieso. Donald, Weygant. Jerry dan Kimmel. Paul. 2015. *Financial Accounting IFRS Edition*. Wiley. USA.
- Mahmud, Rahmat. 2016. Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Dengan Menggunakan Uang Persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol.4 No.2*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Rifai. R. Putri. 2016. Evaluasi Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara. *Jur (Indonesia, 2019)nal EMBA Vol.5 No.1*.
- Rozak. D.A. 2015. Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan Peranannya Dalam Meningkatkan Internal Control Persediaan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis. *Jurnal Wawasan dan Riset Vol.2 No.2*.
- Sujarweni,V. Wiratna. 2016. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Waworega, A. Angie. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol.4 No.13*.